

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
(LKjIP)**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP



CHAINUR BASYID, SE, M.Si
NIP. 19691113 199503 1 003
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	54
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

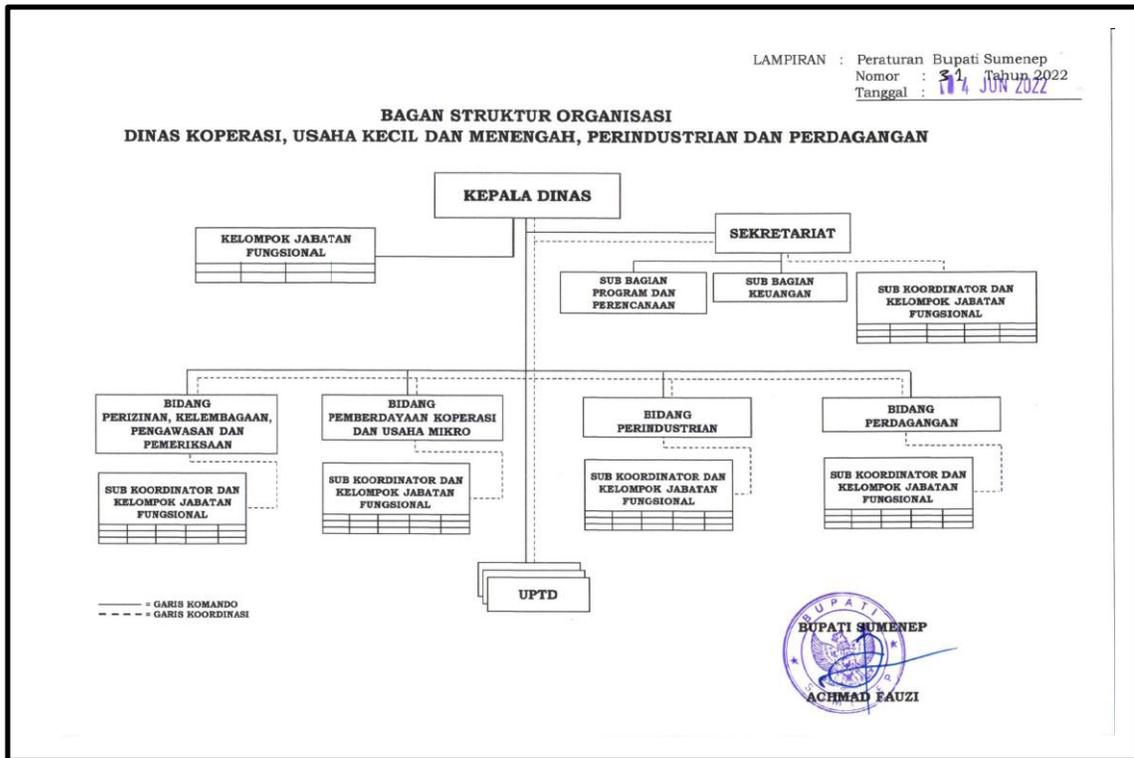
- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro dan kecil;
- b. perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program, perencanaan teknis pendirian dan pembinaan koperasi, usaha mikro dan kecil;

- c. penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendirian badan hukum koperasi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro dan kecil serta advokasi dan hukum;
- f. pembinaan kepada masyarakat koperasi, usaha mikro dan kecil serta pemasaran;
- g. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian dan perdagangan;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan industri dan perdagangan;
- k. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perindustrian dan perdagangan;
- l. pelaksanaan Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penguatan UMKM dan Industri Olahan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja;
2. Penguatan UMKM dan Industri Olahan sebagai daya tarik investasi daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Agustus 2023 mengalami peningkatan 1,71% dari tahun sebelumnya;
2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2021 mengalami peningkatan pada Tahun 2022, peningkatan growth tersebut juga telah melampaui target kinerja RPJMD maupun RKPD di Tahun 2023;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,

Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah:

“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep mengacu pada Misi ke-1 dan Ke-2, yaitu :

Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan;

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	80%	80%	85%	90%	95%
2.	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	1.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	6%	7%	8%	9%	9%
		2.	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	10%	15%	20%	25%	25%
3.	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	0.5%	6.1%	6.2%	6.3%	6.4%
4.	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase fluktuasi harga Bapokti	15%	14,8%	14,6%	14,4%	14,2%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	0.2%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	1.1. Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	%	Menghitung Persentase Pelaku UMKM yang Pendapatannya Mengalami Peningkatan	$\frac{\sum \text{UMKM Pendptan Naik} \times 100\%}{\sum \text{Seluruh UMKM}}$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	2.1 Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	Nilai Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	<u>Nilai PDRB sektor Perdagangan Tahun N-1</u>	BPS
3	Meningkat nya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	3.1 Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	%	Nilai Pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	<u>Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N-1</u>	BPS

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM			Persentase Pertumbuhan UMKM	Persentase (%)	7%
				Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	80%
		1.1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	7%
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	15%
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan			Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	Persentase (%)	5.6%

		2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	Persentase (%)	6.1%
3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor			Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB	Persentase (%)	5.1%
		3.1	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase fluktuasi harga Bapokti	Persentase (%)	14,8%
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase (%)	5.1%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Sakip PD	-	A
		4.1	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	Persentase (%)	80%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan 11 tahun 2023 ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota
Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persentase (%)	7%
	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	7%
	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	15%
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri	Persentase (%)	5.6%

			pengolahan terhadap Total PDRB		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan		Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	Persentase (%)	0.5%
3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB	Persentase (%)	5.1%
	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok		Persentase fluktuasi harga Bapokti	Persentase (%)	15%
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase (%)	0.2%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Sakip PD	-	A
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja PD	Persentase (%)	80%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	12.365.337.022

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	18 dokumen	14.876.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	9.359.805.637
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan	90%	116.608.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	90%	282.301.360
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	65 unit	65.057.933
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	2 Jasa layanan	2.164.507.770
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	46 unit	362.180.322
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa	20%	79.149.440
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	200 Unit Usaha	79.149.440

	Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	6,5%	84.157.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit Usaha	84.157.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik	80%	410.169.980
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	200orang	410.169.980
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6%	325.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	325.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	7 %	455.693.909
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	300 Unit Usaha	455.693.909

		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	5%	2.752.879.676
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	100 Unit Usaha	2.752.879.676
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	15 %	857.326.263
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	47 Unit	857.326.263
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	80%	12.687.760
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	12Laporan	12.687.760
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	2%	118.266.020
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha	118.266.020

11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	15%	150.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	1 Dok	150.000.000
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri	30%	537.734.980
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	2Kali	537.734.980
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100%	4.790.708.122
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	5 dok	4.790.708.122

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 Bulan November Tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota
Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	7%
2	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	Persentase (%)	15%
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	Persentase (%)	6.1%
4	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase fluktuasi harga Bapokti	Persentase (%)	14,8%
5	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase (%)	5.1%
6	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	Persentase (%)	80%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	12.649.363.995
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	18 dokumen	17.276.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	9.464.053.120
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan	90%	90.349.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	90%	336.447.160
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	65 unit	70.315.115
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	2 Jasa layanan	2.299.499.178
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	46 unit	371.423.822
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang	20%	179.999.840

		Telah Diawasi dan Diperiksa		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	200 Unit Usaha	179.999.840
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	6,5%	84.157.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit Usaha	84.157.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik	80%	410.169.980
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelarihan SDM Usaha Mikro	200orang	410.169.980
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6%	625.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	625.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	7 %	1.052.953.359

	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	300 Unit Usaha	1.052.953.359
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	5%	2.899.499.739
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	100 Unit Usaha	2.899.499.739
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	15 %	2.452.790.240
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	47 Unit	2.452.790.240
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	80%	15.281.760
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	12Laporan	15.281.760
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Eksport	2%	352.721.800

	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha	352.721.800
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	15%	170.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	1 Dok	170.000.000
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri	30%	330.974.980
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	2Kali	330.974.980
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100%	5.854.613.801
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	5 dok	5.854.613.801

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Kabupaten/Kota tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	7%	16,24%	232%	Sangat Tinggi	DKUPP Th. 2023

2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	-	BPS Th. 2024
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	6.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	-	BPS Th. 2024

Uraian penjelasan tabel :

- Untuk Tujuan/Sasaran Capaian dan Realisasi Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM dari target kinerja sebesar 7% dan realisasinya sebesar 16,24 dengan Capaian kinerja 232% telah memenuhi capaian target kinerja.
- Untuk Tujuan/Sasaran Capaian dan Realisasi Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran serta Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan masih Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendap	6%	10,47%	174,5%	7%	16,24%	232%

		atannya Meningkat						
2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	0.2%	5,77%	288,5%	5.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	0.5%	7,89%	157,8%	6.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-

Uraian penjelasan tabel :

- Untuk Perbandingan Tujuan/Sasaran Capaian dan Realisasi Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM pada Tahun 2023 Capaian Kinerja sebesar 232% lebih tinggi dari tahun 2022 yang meraih capaian kinerja pada sebesar 174,5%.
- Untuk Perbandingan Tujuan/Sasaran Capaian dan Realisasi Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran serta Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan belum bisa dilakukan perhitungan karena masih menunggu rilis PDRB oleh BPS 2024.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkatkan	16,24%	9%	180,44
2	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkatkan	15,69%	25%	62,76
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	6.4%	-
4	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase fluktuasi harga Bapokti	11,70%	14,2%	82,39
5	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	5.4%	-
6	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90%	95%	94,74

Uraian penjelasan tabel :

- Tingkat Kemajuan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM diperoleh ratio persentase peningkatan sebesar 180,44% antara realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 16,24% dan target pada akhir tahun 2026 sebesar 9%. Hal ini menandakan bahwa target yang dicapai pada tahun ini sudah melampaui target akhir renstra;

- Tingkat Kemajuan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Koperasi diperoleh ratio persentase peningkatan sebesar 62,76% antara realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 15,69% dan target pada akhir tahun 2026 sebesar 25%. Hal ini menandakan bahwa capaian tahun ini sudah baik dan melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan akan tetapi masih membutuhkan usaha untuk mencapai target akhir periode;
- Ratio Tingkat Kemajuan Sasaran Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok sebesar 82,39% antara realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 11,70% dan target akhir tahun 2026 sebesar 14,2%. Pada sasaran ini ditunjukkan bahwa capaian tahun ini sudah melampaui target akhir periode renstra dimana persentase yang diperoleh lebih kecil dari target yang ditetapkan;
- Tingkat Kemajuan Sasaran Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah diperoleh ratio sebesar 94,74% antara realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 90% dan target pada akhir tahun 2026 sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dicapai pada tahun 2023 sudah melampaui target yang ditetapkan dan membutuhkan kinerja yang lebih baik untuk mencapai target akhir periode renstra;
- Tingkat Kemajuan Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan dan meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran belum bisa dihitung karena masih menunggu rilis PDRB oleh BPS 2024.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	4,4%	-	-

	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	16,24%	-	-
	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	52,08%	-	-
	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	15,69%	-	-
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	18,34%	-
	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	5,20%	4,89%	-
3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	12,85%	-
	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase fluktuasi harga Bapokti	11,70%	-	-
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan	4,86%	5,52%	-

		n besar dan eceran			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sakip PD	A	-	-
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90%	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100	Bersifat penyediaan dan disesuaikan kebutuhan	Perencanaan terhadap kebutuhan disesuaikan keadaan dan mengikuti ASB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evakuasi perangkat daerah	18 dokumen	18 dokumen	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang/bulan	88 orang/bulan	101		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan	90%	90%	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	90%	90%	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	6 Paket	6 Paket	100		

		Penggandaan yang Disediakan					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	17 unit	17 unit	100		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	2 jasa layanan	2 jasa layanan	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	44 unit	44 unit	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	100		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	100		

		Dipelihara/Direhabilitasi					
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa	20 %	20 %	100	Pengawasan membutuhkan personil yang cukup banyak serta anggaran yang banyak mengingat sebaran koperasi di daerah Sumenep yang tersebar	Mengoptimalkan anggaran dan personil yang ada dengan melakukan penjadwalan yang merata
	Pemeriksaan Dan Penawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100		
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Unit Usaha Kabupaten/Kota Kinerja	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	6.5 %	6.5 %	100	Pengawasan membutuhkan personil yang cukup banyak serta anggaran yang banyak mengingat sebaran koperasi di daerah Sumenep yang tersebar	Mengoptimalkan anggaran dan personil yang ada dengan melakukan penjadwalan yang merata

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100		
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100		
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100		
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik	100 %	115 %	115	Beberapa Koperasi yang ada dan melakukan RAT akan diundang untuk mengikuti pelatihan	Mengoptimalkan anggaran yang didapat dari DAK non fisik
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	200 orang	230 orang	115		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	200 orang	230 orang	115		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	6 %	6 %	100	Beberapa koperasi dibina untuk pengembangan usaha baru sehingga omset meningkat	Memberdayakan koperasi melalui tenaga pendamping provinsi
	Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100		

	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 orang	100 orang	100		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	7 %	7 %	100	Anggaran yang tersedia tidak mengcover semua UKM dalam memperoleh fasilitasi dan pelatihan	Untuk sementara memprioritaskan beberapa pelaku UKM yang potensial untuk berkembang
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	100		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		

		Terhadap Usaha Mikro					
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	5 %	5 %	100	Anggaran yang tersedia tidak mengcover semua UKM dalam memperoleh fasilitasi dan pelatihan	Untuk sementara memprioritaskan beberapa pelaku UKM yang potensial untuk berkembang
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100		
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	15 %	15 %	100	Kondisi sarana perdagangan yang ada Sebagian besar sudah kurang layak sedangkan pembangunan yang baru kurang diminati	Merencanakan perbaikan dan pembangunan sarana yang baru dengan melibatkan pelaku usaha
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47 Unit	47 Unit	100		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	100		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	45 Unit	45 Unit	100		
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	80 %	80 %	100	Beberapa komoditas mengalami kelangkaan	Perlu koordinasi tim pengendali

	POKOK DAN BARANG PENTING					stok sehingga harga mengalami kenaikan	harga dengan bulog/provisi untuk dilakukan intervensi
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100		
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	100		
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	2 %	2 %	100	Masih sedikit komoditi yang melakukan ekspor	Perlu dilakukan fasilitasi promosi dan peningkatan kualitas produk
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100		
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	15 %	15 %	100	Tenaga SDM yang kompeten sangat sedikit dan anggaran juga sangat minim	Mengajukan penambahan personil agar bisa mengcover seluruh daerah
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal	1 Dok	1 Dok	100		

	Ulang, dan Pengawasan	Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit	1500 Unit	100		
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri	30 %	30 %	100	Masih terbatasnya penggunaan produk dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan	Perlunya dibuat peraturan yang mewajibkan penggunaan dan mendorong ukm untuk membuat produk yg dibutuhkan
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	2 Kali	2 Kali	100		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	2 UMKM	100		
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem informasi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100 %	100 %	100	Belum terselesaikannya Perda RIPIK yang mengatur pengembangan industri	Melakukan permohonan ke dewan untuk segera dirapatkan dan disediakan anggaran
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi	5 dok	5 dok	100		

		Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 dok	2 dok	100		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dok	2 dok	100		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dok	1 dok	100		

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persenta se capaian kinerja PD	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n penganggar an dan evakuasi perangkat daerah	100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan	100%	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	

					yang Disediakan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDsi dan Konsultasi SKPD	100%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100%	

					yang Disediakan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	
2	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	104,60%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa	100%	Menunjang
				Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	100%	
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan,	100%	

				Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Unit Usaha Kabupaten/ Kota Kinerja	100%	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	100%	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100%	
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	100%	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik	115%	

				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	115%	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	115%	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	100%	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100%	
3	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang pendapatannya Meningkat	232%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui	100%	

				Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100%	
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100%	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100%	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	100%	
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	100%	
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100%	

4	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	Persentase Fluktuasi Harga Bapokti	11,70	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	100%	Menunjang
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100%	
5	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Menunggu Rilis resmi BPS 2024	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	100%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan	100%	

					n Nilai Ekspor		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	100%	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	100%	
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100%	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri	100%	

				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100%	
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100%	
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem informasi perdagangan	100%	
6	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	Menunggu Rilis resmi BPS 2024	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100%	Menunjang
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen	100%	

					Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100%	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.7 ditampilkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan mendukung semua sasaran strategis yang menjadi tupoksi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.649.363.995	9.440.925.382	74,64
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.276.000	17.098.500	98,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.464.053.120	6.311.467.159	66,69
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.349.600	69.900.200	77,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.447.160	331.754.344	98,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.315.115	65.895.910	93,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.299.499.178	2.273.977.204	98,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.423.822	370.832.065	99,84
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	179.999.840	179.851.399	99,92
	Pemeriksaan Dan Penagwasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	179.999.840	179.851.399	99,92
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	84.157.000	83.501.500	99,22
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.157.000	83.501.500	99,22
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	410.169.980	405.779.400	98,93
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	410.169.980	405.779.400	98,93
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	625.000.000	425.000.000	68,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000	425.000.000	68,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.052.953.359	1.032.896.352	98,10
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.052.953.359	1.032.896.352	98,10
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.899.499.739	2.833.303.380	97,72
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.899.499.739	2.833.303.380	97,72

8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.452.790.240	2.356.488.090	96,07
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.452.790.240	2.356.488.090	96,07
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15.281.760	13.579.750	88,86
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.281.760	13.579.750	88,86
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	352.721.800	351.611.257	99,69
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	352.721.800	351.611.257	99,69
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	170.000.000	169.541.528	99,73
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	170.000.000	169.541.528	99,73
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	330.974.980	288.421.480	87,14
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	330.974.980	288.421.480	87,14
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan masih diatas 80%. Terdapat beberapa sub kegiatan yang berada dibawah 70% realisasi anggarannya yaitu pertama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 66,69% yang merupakan penyediaan gaji PNS dan kedua Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 68% yang disebabkan adanya hibah keuangan yang tidak terserap karena ditolak oleh penerima.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Persentase Pertumbuhan UMKM	7%	4,4%	62,85%	3.952.453.098	3.866.199.732	97,82%	0,64
	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	7%	16,24%	232%	3.952.453.098	3.866.199.732	97,82%	2,37
	Persentase Koperasi Aktif	80%	52,08%	65,10%	1.299.326.820	1.094.132.299	84,21%	0,77
	Meningkatnya Pendapatan Koperasi	15%	15,69%	104,60%	1.299.326.820	1.094.132.299	84,21%	1,24
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	5.6%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53%	-
	Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan	6.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53%	-
3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	3.321.768.780	3.179.642.105	95,72%	-
	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	14,8%	11.70%	126,49%	15.281.760	13.579.750	88,86%	1,42
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5.1%	Menunggu Rilis PDRB oleh BPS 2024	-	3.306.487.020	3.166.062.355	95,75%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	A	100%	12.649.363.995	9.440.925.382	74,64%	1,34
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	80%	90%	112,50%	12.649.363.995	9.440.925.382	74,64%	1,51

*Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien***

*Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien***

Uraian penjelasan tabel :

- Pada indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan UMKM tingkat efisiensi sebesar 0,64% hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah sedangkan pada indikator sasaran Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM tingkat efisiensi sebesar

2,37%, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya pendapatan pelaku UMKM tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah UMKM akan tetapi menunjukkan bahwa UMKM yang ada sudah banyak yang berkembang usahanya dan hal ini diharapkan bisa menarik minat tumbuhnya pelaku usaha baru;

- Pada indikator Tujuan Persentase Koperasi Aktif tingkat efisiensi sebesar 0,77% menunjukkan tingkat efisiensi masih rendah sedangkan pada indikator sasaran Meningkatnya Pendapatan Koperasi tingkat efisiensi sebesar 1,24% menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa beberapa koperasi menunjukkan perkembangan usaha dan omset akan tetapi terbentuknya koperasi masih rendah, hal ini bisa disebabkan tambah ketatnya syarat pendirian koperasi termasuk modalnya;
- Tingkat efisiensi indicator Tujuan Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor belum bisa ditentukan Tingkat Efisiensinya karena masih menunggu rilis PDRB dari BPS Sumenep 2024;
- Tingkat efisiensi indicator Tujuan Meningkatkan kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan belum bisa ditentukan Tingkat Efisiensinya karena masih menunggu rilis PDRB dari BPS Sumenep 2024;
- Tingkat Efisiensi indikator Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 1,34% menunjukkan tingkat efisiensi tinggi begitu juga dengan Tingkat efisiensi indicator Sasaran Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 1,51%, dari perbandingan tersebut dapat dikatakan efisien dari segi penyerapan anggaran dengan hasil kinerja yang ditetapkan, karena anggaran yang disediakan memang untuk mendukung dalam kinerja pegawai.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	100%	12.649.363.995	9.440.925.382	74,64%	1,34
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dokumen	18 dokumen	100%	17.276.000	17.098.500	98,97%	1,01
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	9.464.053.120	6.311.467.159	66,69%	1,50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	90%	100%	90.349.600	69.900.200	77,37%	1,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	90%	100%	336.447.160	331.754.344	98,61%	1,01
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 unit	17 unit	100%	70.315.115	65.895.910	93,72%	1,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jasa layanan	2 jasa layanan	100%	2.299.499.178	2.273.977.204	98,89%	1,01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44 unit	44 unit	100%	371.423.822	370.832.065	99,84%	1,00
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20 %	20 %	100%	179.999.840	179.851.399	99,92%	1,00
	Pemeriksaan Dan Penagwasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	179.999.840	179.851.399	99,92%	1,00

	Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota							
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.5 %	6.5 %	100%	84.157.000	83.501.500	99,22%	1,01
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%	84.157.000	83.501.500	99,22%	1,01
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100 %	115 %	115%	410.169.980	405.779.400	98,93%	1,16
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 orang	230 orang	115%	410.169.980	405.779.400	98,93%	1,16
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6 %	6 %	100%	625.000.000	425.000.000	68,00%	1,47
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	625.000.000	425.000.000	68,00%	1,47
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7 %	7 %	100%	1.052.953.359	1.032.896.352	98,10%	1,02
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	100%	1.052.953.359	1.032.896.352	98,10%	1,02

	dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5 %	5 %	100%	2.899.499.739	2.833.303.380	97,72%	1,02
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	2.899.499.739	2.833.303.380	97,72%	1,02
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15 %	15 %	100%	2.452.790.240	2.356.488.090	96,07%	1,04
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47 Unit	47 Unit	100%	2.452.790.240	2.356.488.090	96,07%	1,04
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80 %	80 %	100%	15.281.760	13.579.750	88,86%	1,13
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	15.281.760	13.579.750	88,86%	1,13
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2 %	2 %	100%	352.721.800	351.611.257	99,69%	1,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100%	352.721.800	351.611.257	99,69%	1,00
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNG	15 %	15 %	100%	170.000.000	169.541.528	99,73%	1,00

	AN KONSUMEN							
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1 Dok	1 Dok	100%	170.000.000	169.541.528	99,73%	1,00
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	30 %	30 %	100%	330.974.980	288.421.480	87,14%	1,15
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Kali	2 Kali	100%	330.974.980	288.421.480	87,14%	1,15
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100 %	100 %	100%	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53%	1,08
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 dok	5 dok	100%	5.854.613.801	5.417.237.447	92,53%	1,08

*Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien***

*Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien***

Uraian penjelasan tabel :

Dari seluruh Program dan kegiatan Tingkat efisiensi dari perbandingan kinerja pegawai dan penyerapan anggaran bisa dikatakan efisien karena nilainya ≥ 1 .

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 4 tujuan dan 6 sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 4 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja belum bisa dihitung persentase rata-ratanya karena masih menunggu rilis PDRB dari BPS;
- Sasaran 6 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja belum bisa dihitung persentase rata-ratanya karena masih menunggu rilis PDRB dari BPS.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 27.910.420.344 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 25.901.226.039, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92,80% dan nilai efisiensi anggaran sebesar > 1.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP



CHAINUR BASTID, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196911131995031003

